




Status 2 ASN Pemkot

Masih Saksi

■ Dugaan Suap Proyek SAH di Yogyakarta

■ KPK Lakukan Pengembangan Kasus


**Status dua ASN Pemkot
Yogyakarta adalah saksi.
Nanti jika dibutuhkan
pemeriksaan akan dipang-
gil kembali**

Febri Diansyah
Juru Bicara KPK

YOGYA, TRIBUN - Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang pada Senin (19/8) diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah pulang. Hal itu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap proyek saluran air hujan (SAH) Jalan Prof Dr. Soepomo.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, status dua ASN Pemkot Yogyakarta tersebut adalah saksi dalam kasus OTT tersebut. "Nanti jika dibutuhkan pemeriksaan akan dipanggil kembali," katanya, Rabu (21/8), malam.

Dua ASN yang sempat diamankan KPK tersebut adalah ALN, Kepala Bidang Sum-

ber Daya Air, Dinas PUPKP Yogyakarta. Dan, BAS, anggota Badan Layanan Pengadaan, Anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi SAH Jalan Prof Dr. Soepomo.

Keduanya hanya dimintai keterangan oleh KPK, terkait dugaan suap proyek SAH tersebut.

Kepala Bidang Badan Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Yogyakarta, Sukadarmasman, mengatakan, keduanya hanya dimintai keterangan terkait OTT untuk menambah informasi. "ALN dimintai keterangan karena selaku pejabat pembuat komitmen, sedangkan BAS sebagai pokja

● ke halaman 7

Status 2 ASN Pemkot Masih

• Sambungan Hal 1

atau kalau dulu panitia lelang," urainya.

Menurut Sukadarisman, proses pengadaan sudah berjalan normatif seperti yang sudah tersedia di aplikasi yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Pokja telah melakukan lelang sesuai aturan," urainya.

Sukadarisman, menjelaskan, kontraktor bisa menjadi pemenang karena telah lulus administrasi, lulus teknis, lulus kualifikasi, dan yang terakhir lulus penawaran harga, dan harga terendah.

"Yang menang itu sudah memenuhi syarat tadi. Kerja BLP menetapkan lelang, lalu pekerjaan ada di PU (DPUP-KP)," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, selain dua ASN Pemkot Yogyakarta, KPK mengamankan GYA, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Mataram); NVA, Direktur PT. Manira Arta Mandiri; ESF, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D.

KPK pun sudah menetapkan tiga tersangka. Antara lain, GYA, ESF (jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D), dan SSL (jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta). GYA selaku pemberi suap, sedangkan ESF dan SSL selaku penerima suap.

Dugaan uang suap yang sudah diserahkan kepada ESF dan SSL sekitar Rp221 juta, atau sekitar 3 persen dari 5 persen kesepakatan komitmen *fee*. Ratusan juta rupiah tersebut diberikan dalam tiga tahap.

Pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta. Pada 15 Juni 2019, sebesar Rp100.870.000. Pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000. Sedangkan sisa *fee* 2 persen, direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019.

Proyek SAH dihentikan

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, memastikan, OTT KPK di Solo terkait proyek rehabilitasi SAH Jalan Prof Dr. Soepomo, Babaran, dan sirip-siripnya, dengan pagu Rp10,89 miliar.

Dalam lelang dimenangkan kontraktor dengan nilai penawaran Rp8,3 miliar. Pemenang lelang adalah PT Widodo Kandang, Perusahaan pemenang lelang ini di bawah kendali tersangka, GYA, yang juga Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram).

Agus, menjelaskan, proyek saluran air hujan tersebut statusnya sudah dihentikan, dan sedang dilakukan audit bersama inspektorat.

"Ada konsultan manajemen konstruksi diaudit dan kita kombinasikan berapa fisik yang sudah dikerjakan. Dia ada jaminan uang muka dan pelaksanaan yang harus diurus administrasinya. Baru

kita melangkah," terang Agus se usai melakukan rapat koordinasi bersama Wali Kota Yogyakarta di kompleks balai kota, kemarin.

Evaluasi target

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menjelaskan, setelah KPK memintai keterangan pada ASN Pemkot Yogyakarta, keduanya diperbolehkan pulang.

"Tidak terlibat kegiatan yang dilakukan OTT tersebut, Patut disyukuri. (ALN dan BAS) Sudah pulang. Saya minta Senin kembali bekerja," katanya.

Haryadi, menjelaskan, proyek saluran air hujan tersebut sudah dihentikan. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi terkait target dan tata kala pengerjaan proyek tersebut.

"Proyek itu berhenti. (Situasi) seperti ini apakah bisa dilanjutkan, stop, atau tender ulang tahun datang. Sembari menunggu, misalnya lubang-lubang ditutup dulu, tali-tali dilepas. Kalau boleh dilakukan sekarang ya kita lakukan. Persoalannya, ini menyangkut hukum dan sisi waktu apakah *nutut*," bebemnya.

Ia pun menekankan bahwa tidak ada yang salah dalam TP4D. "TP4D tidak ada yang salah, ini oknum," ujarnya.

Haryadi berpesan kepada seluruh jajarannya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terlebih yang berurusan dengan kewenangan.

"Teman-teman di BLP agar tidak terpengaruh apabila ada saran, masukan, yang berpotensi menjadi pelanggaran pada saat lelang," pungkaskannya.

Paket lelang 2019

Perlu diketahui, lelang Pamkot Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dari APBD murni sejumlah 175 paket pekerjaan lelang.

Paket pekerjaan yang sudah masuk Bidang Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Yogyakarta hingga 19 Agustus 2019 sebanyak 169 paket.

Dari 169 paket tersebut, yang sudah selesai lelang dan ada pemenang sejumlah 112 paket, dan dalam proses lelang di BLP sebanyak 57 paket. Sementara, ada 6 paket yang belum masuk BLP.

Nilai pagu anggaran untuk 112 paket yang sudah masuk BLP adalah Rp187,8 miliar, dengan nilai kontrak Rp113,8 miliar. Terdapat efisiensi sebesar Rp73,9 miliar atau 39,4% dari pagu anggaran.

Paket pekerjaan tersebut terdiri dari pekerjaan konstruksi (103 paket), pengadaan barang (25 paket), pekerjaan jasa lain (28 paket), dan pekerjaan jasa konsultan (19 paket).

Belum diawasi inspektorat

Sementara itu, proyek pengerjaan SAH di Umbulharjo yang menjadi proyek dugaan suap belum menjadi proyek yang diawasi Inspektorat Pemkot Yogyakarta.

Inspektur Pembantu Pembangunan Fisik, Inspektorat Pemkot Yogyakarta, Puji Astuti, mengatakan, sebelum

ada OTT KPK, pihaknya belum melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut. Meski demikian, pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan.

"Awalnya kami tidak tahu, proyek yang mana. Setelah itu kami cek lapangan, ternyata proyeknya masih baru. Kami lihat belum ada lima persen pengerjaan," katanya, kemarin.

Ia, menjelaskan, untuk pengawasan fisik, pihaknya telah melakukan perencanaan dalam satu tahun. Karena beberapa keterbatasan, dalam satu tahun hanya ada empat proyek saja yang diawasi.

Yang menjadi prioritas Inspektorat adalah proyek yang memiliki dampak tinggi untuk masyarakat dan juga proyek yang memiliki risiko penyimpangan paling tinggi.

"Kami tidak bisa mengawasi seluruh pembangunan di Kota Yogyakarta. Makanya kami buat prioritas, satu tahun ada empat proyek yang diawasi oleh Inspektorat, yang ditetapkan oleh Inspektur," jelasnya.

"Jadi kalau ada beberapa proyek, kami sortir dulu, kami pilih mana yang dampaknya paling tinggi dan risiko yang paling tinggi, itu yang kami awasi," sambungnya.

Selain melakukan pengawasan, pihaknya juga melakukan beberapa kegiatan audit, satu di antaranya adalah audit kinerja. Melalui audit kinerja, pihaknya memastikan agar proyek berjalan baik tanpa ada penyimpangan.

"Audit ini jadi alternatif kami, kadang kan kalau kita rencanakan di awal, ada yang tidak sesuai. Misalnya ada yang masih proses lelang. Dengan ini kan kami bisa cek. Misalnya triwulan ketiga kok belum selesai," ujarnya.

Pemantauan

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta melakukan pemantauan proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Babaran, Celeban, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, kemarin.

Proyek tersebut diduga merupakan proyek terkait OTT ~~KPK~~ yang melibatkan oknum jaksa Kejaksaan Yogyakarta yang juga anggota TP4D.

Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, mengatakan, Pemkot Yogyakarta harus segera memberikan kepastian nasib proyek tersebut. "Kami mendorong Pemkot Yogyakarta segera menentukan nasib pengerjaan SAH ini. Jangan terlalu terlalu lama. Harapan kami tetap dilanjutkan, kasih warga," katanya.

Dari informasi warga, pengerjaan proyek SAH dimulai pada 6 Agustus 2019. Namun, warga sempat bingung karena mulai hari ini pengerjaan sudah dihentikan, tapi sampai kapan belum ada jawaban pasti.

Ketua Kampung Celeban, Tahunan, Umbulharjo, Sundarto (63), mengungkapkan, ada 25 KK di tepi jalan yang terdampak proyek SAH di Jalan Babaran. Warga khawatir akan nasib proyek tersebut, sebab alat berat sudah mulai diambil. **(kur/maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 13 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005